



**MEDIA KALTIM PARTNERSHIP TRIP KAPOLRES PPU AKBP HENDRIK EKA BAHALWAN**  
**BAHAS SINERGITAS MEDIA, PENEGAKAN HUKUM HINGGA PERAN UMKM**

BACA HALAMAN 17



**MEDIA KALTIM PARTNERSHIP TRIP KEPALA DISKOMINFO PPU, KHAIRUDIN NISSE**  
**BAHAS PENGEMBANGAN INFORMASI PUBLIK HINGGA PEMBERITAAN BERKUALITAS**

BACA HALAMAN 19



**MEDIA KALTIM PARTNERSHIP TRIP KETUA BPC PHRI PPU, SANDRY ERNAMURTI**  
**KOLABORASI GALI POTENSI PARIWISATA JELANG PEMINDAHAN IKN**

BACA HALAMAN 21

# Koran DIGITAL



*Lebih Dekat dengan Satu Klik*

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023



TERVERIFIKASI DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI  
**0811 5405 033**



**TKI ILEGAL TERCIDUK BAWA SABU 3 KG DARI MALAYSIA**

BACA HALAMAN 2



Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana dan Panit Sidik Subdit I, Ipda Candra Silalahi menunjukkan barang bukti sabu 3 kg.

# Polda Kaltim Tangkap TKI Ilegal Bawa Sabu 3 Kg dari Malaysia

**BALIKPAPAN**-Polda Kaltim melalui Subdit Ditreskoba berhasil menangkap seorang pemuda berinisial MS (21) yang merupakan seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan membawa narkoba jenis sabu, di kawasan Kariangau, Balikpapan Barat pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana mengatakan, tersangka membawa sabu dari Malaysia dan membawanya hingga ke Balikpapan melalui jalur darat, hingga akhirnya ditangkap pada Kamis dini-

hari sekitar pukul 00.15 wita. "Pelaku merupakan TKI ilegal. Dan sabu ini didapatnya dari Malaysia kemudian dibawa ke Balikpapan lewat darat seorang diri," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan, barang bukti sabu yang didapat dari tangan tersangka sebanyak 3.073 atau 3 kilogram lebih dengan kualitas super. "Sabu dibawa dan dibungkus menggunakan bungkus teh hijau. Dan setelah di tes, kualitas sabu ini memiliki kualitas super. Bagus sekali ini," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, belum

diketahui akan diantar kemana paket sabu ini. Pasalnya, tersangka hanya diminta untuk membawanya ke Balikpapan saja dengan upah sebesar Rp 50 juta. "Kita masih dalam lagi siapa yang akan ambil barang ini. Dia diminta sampai di Balikpapan aja dengan upah Rp 50 juta," tambah I Nyoman.

Atas perbuatannya, tersangka pun terancam hukuman paling ringan 10 tahun dan paling berat seumur hidup.

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Nicha Ratnasari*



SAMARINDA

# GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE  
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

[all.accor.com](https://all.accor.com)



AUDIENSI : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan rombongan Tim Teknis Mahkamah Agung (MA RI, Rabu (13/9).

## Pembangunan Gedung PTA dan PT di KBM Tanjung Selor Akan Dimulai Tahun 2024

**TANJUNG SELOR** - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, menerima kedatangan Tim Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pertemuan itu berlangsung di Kuliner Tepian Kayan (Kultecka) di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (13/9/2023) malam.

Pertemuan ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang akan dibangun di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Adapun rombongan dipimpin oleh Bapak H. Sahwan, SH., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI. Hadir sejumlah anggota tim terampil lainnya seperti Rosfiana, SH., M.H

(Kepala Biro Perlengkapan), Fany Widia, SE., MM (Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Arif Hidayat, SE., M.H (Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Indah Wahyuni, SE, M.M (Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Program Biro Perencanaan dan Organisasi), Rustimah, A.Md., SH., M.M (Kasubbag Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi), serta Desy Putriani Purwastuti, SE, (Staff PPNPN Biro Perlengkapan).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Teknis MARI dengan tekad kuat menyatakan komitmennya untuk segera memulai pembangunan gedung PTA dan PT di KBM Tanjung Selor.

"Kami sudah melakukan survei lokasi, dan rencananya, pembangunan akan dimulai pada tahun 2024," kata Ketua Tim MA RI, H. Sahwan.

Sementara Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik upaya MA RI untuk segera membangun gedung PTA dan PT di wilayah Provinsi Kaltara.

"Pemprov sangat mendukung pembangunan ini, dan kami berharap pembangunan tersebut dapat segera terealisasi," ujar Gubernur Kaltara.

Seperti yang diketahui, pembangunan gedung PTA dan PT memegang peran penting dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kaltara. Gedung ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan hukum yang modern dan efisien di wilayah Kaltara, sekaligus menjadi simbol penegakan hukum yang kuat di daerah.

"Semoga proyek ini sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," ujar Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. (dkisp)

## Wagub Kaltara Tinjau Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur

**TANJUNG SELOR** - Usai meninjau pembangunan gedung asrama Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si., juga melakukan pengecekan terhadap perkembangan proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kaltara, Selasa (12/9).

Rumah jabatan ini merupakan fasilitas penting yang akan mendukung tugas-tugas Gubernur Kaltara dalam memimpin daerah. "Saat ini, proyek pembangunan rumah jabatan ini masih dalam tahap pengerjaan dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2023," kata Wagub Kaltara Yansen TP.

Wagub Yansen TP berharap rumah jabatan ini dapat menjadi tempat yang nyaman dan kondusif bagi Gubernur Kaltara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam pembangunan rumah jabatan ini.

"Rumah jabatan Gubernur Kaltara dirancang sebagai pusat penting yang akan memungkinkan Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal," ungkap Yansen TP, Wagub Kaltara. (dkisp)



**MONITORING** : Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si melakukan monitoring terhadap pembangunan Rumjab Gubernur, Selasa (12/9) lalu.

## Gubernur Ingatkan ASN agar Siap Hadapi Berbagai Situasi



**PEMBINAAN**: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum membuka Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian di Lantai 1 Gedung Gadis, Kamis (14/9).

**TANJUNG SELOR** – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar selalu siap menghadapi berbagai situasi. Salah satunya dengan penyetaraan jabatan struktural yang menjadi jabatan fungsional.

Menurutnya, esensi dari penyetaraan dalam jabatan fungsional ini adalah agar terciptanya iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.

"Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memberi pemahaman bagi pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat fungsional dari dinamika regulasi yang mengatur," kata Gubernur pada Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemprov Kaltara, Kamis (14/9).

Gubernur mengungkapkan proses penyederhanaan birokrasi terus dilakukan di Kaltara. Hal ini merupakan wujud mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memangkas panjang alur birokrasi sehingga dapat bergerak secara inovatif adaptif dan responsif.

Turut hadir Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, dan Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, A. Darmuji, S.Sos., M.Si secara daring (Zoom Meeting) serta seluruh forkopimda.

"Adanya regulasi ini harus kita sosialisasikan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi kepegawaian di lingkup provinsi dan kabupaten/kota," tuntasnya. (dkisp)



ISTIMEWA

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang.

## Bakhtiar Wakkang: Ada Celah Masyarakat Bisa Pelihara Buaya!

**BONTANG** – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang menyoroti rencana relokasi Buaya Riska. Menurutnya ada celah dari UU yang ada, agar masyarakat bisa memelihara buaya.

Politisi Partai Nasdem ini menyoroti aspek hukum terkait pemeliharaan buaya yang telah lama dirawat oleh Ambo, warga Guntung.

BW sapaan akrabnya mengingatkan, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati member-

ikan celah bagi masyarakat untuk memelihara buaya.

“Hal ini dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penangkaran, dengan penekanan bahwa Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) akan melakukan pemantauan rutin terhadap perjalanan penangkaran tersebut. Lembaga konservasi atau penangkaran yang telah mendapat izin memiliki hubungan kemitraan dengan BKSDA,” bebernya.

Bakhtiar Wakkang juga mengungkapkan bahwa BKSDA memiliki ke-

wenangan untuk menitipkan buaya hasil tangkapan atau penyerahan warga kepada lembaga konservasi atau penangkaran perorangan untuk perawatan lebih lanjut.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa persoalan yang melibatkan Pak Ambo dapat difasilitasi dengan menghubungi BKSDA untuk melakukan asesmen dan pemeliharaan lebih lanjut terhadap buaya tersebut, dengan memastikan bahwa buaya tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1990. (al/adv)



Komisi III DPRD Bontang saat memimpin RDP, Senin (11/9/2023) lalu.

## Akses Jalan Masuk ke Calon Pemakaman Bontang Barat Sudah D hibahkan

**BONTANG** – Kabid Pertanahan Dinas Perkim Bontang, Ishak Karangany menyebutkan, saat ini progres calon lahan pemakaman di Bontang Barat sudah sampai pada penyerahan akses jalan oleh pemilik.

Hal itu diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bontang bersama pemilik lahan terkait lahan pemakaman Bontang Barat, Lahan RTH BSD, dan Lahan RTH di Jalan Brokoli di Kelurahan Gunung Elai, Senin (11/9/2023).

Dijelaskan Ishak, saat ini pemilik tanah yang bakal digunakan sebagai akses masuk menuju calon Lahan Pemakaman Bontang Barat tersebut, sudah menyerahkan kepada Pemkota Bontang. Sehingga saat ini sudah

ada kejelasan masalah legalitas akses jalan masuk itu.

“Pemilik tanah sudah hibahkan secara formal, bahkan sudah teregistrasi di Kantor Lurah Kanaan. Sehingga sudah ada hitam di atas putihnya bahwa tanah untuk akses masuk itu sudah diserahkan,” jelasnya.

Berikutnya yang akan dilakukan pihaknya adalah pengukuran lahan di awal Oktober mendatang. Pengukuran lahan lebih valid dengan menghadirkan para saksi batas. Lantaran pengukuran sebelumnya tak ada saksi batas.

“Secara umum calon lahan pemakaman Bontang Barat itu sudah direkomendasikan. Sekarang hanya tinggal mengurus legalitasnya saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengaku masih meraba-raba terkait calon lahan pemakaman Bontang Barat ini. Lantaran lahan tersebut masih dalam tahap kajian tim akademis dari Universitas 11 Maret Surakarta.

“Kami masih tunggu hasil kajiannya secara akademis apakah layak dimanfaatkan dengan baik. Apakah cocok untuk pemakaman atau tidak,” pungkasnya.

Diketahui, calon lahan Pemakaman Bontang Barat yang direkomendasikan berada di Kelurahan Kanaan tepatnya di seberang Pemakaman Toraja, atau di belakang Musala Bussalam. (al/adv)



YUSVA ALAM

Sidak Komisi I DPRD Bontang di proyek pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Tengah.

## Komisi I Optimistis Proyek Kantor Lurah Berbas Tengah Kelar Sebelum Tahun Baru

**BONTANG** – Komisi I DPRD Bontang melakukan sidak lapangan ke proyek pembangunan Kantor Kelurahan Berbas Tengah, Rabu (13/9/2023) kemarin. Sidak diikuti oleh Wakil Ketua Komisi I, Raking dan Sekretaris Komisi I, Irfan.

Dikatakan Raking, progres pembangunan di Kantor Lurah Berbas Tengah ini sudah mencapai 50 persen dari target yang ditetapkan. Artinya, pihaknya optimistis proyek ini akan selesai sesuai dengan target yang dicantumkan, yaitu di November 2023

mendatang.

“Kami yakin sebelum tahun baru kantor ini sudah bisa dioperasikan,” ujarnya usai sidak.

Namun begitu, pihaknya mem-wanti-wanti terkait masalah keselamatan para pekerja. Lantaran proyek yang dikerjakan oleh CV Silpia Rusmana tersebut tidak terlalu memperhatikan masalah keamanan pekerjaannya. Masih terlihat ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan helm dan hanya mengenakan sandal.

“Kata Pak Irfan nyawa itu gak bisa dibeli. Ownernya bilang ada aja perlengkapan safety-nya, namun para pekerjanya yang tidak terbiasa memakainya. Ya seharusnya ditegaskan untuk selalu memakai perlengkapan safety,” tegasnya.

Sementara untuk BPJS dipastikan aman, lantaran pihak perusahaan sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem kontrak. BPJS hanya berlaku selama proyek berlangsung. **(al/adv)**





SS IG MUARABADAK.KALTIM

Kondisi Jembatan Sambera dari atas.

## Jembatan Sambera Bakal Ditutup Akibat Perbaikan, Pengguna Jalan Dialihkan Lewat Pertamina

**TENGGARONG** - Rehabilitasi Jembatan Sambera yang berada di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, terus berprogres. Pengerjaan yang dilakukan sejak Juni 2023 lalu, kini sudah mulai dalam tahapan penutupan total jembatan.

Penutupan secara full sendiri akan dilakukan pada 23 September hingga 31 Desember 2023. Lantaran pihak kontraktor akan segera melakukan pengerjaan badan jalannya.

Maka dari itulah, masyarakat pun harus mengambil jalan alternatif. Yakni dengan melalui jalur alternatif di KM 08 Pipeline dan KM 10 Pipeline milik Pertamina. Yang lokasinya berada sejauh 2 kilometer (km) dari lokasi Jembatan Sambera. Karena jalan tersebut milik Pertamina, maka kendaraan besar yang akan melintas pun dibatasi. Maksimal kendaraan seberat 9 ton saja, selebihnya tidak bisa memanfaatkan akses tersebut.

"Sebelumnya kita juga kerjakan jalan pengalihan yang dimiliki Pertamina (KM 08 dan KM 10 Pipeline Pertamina)," ujar Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, Restu Irawan, Kamis (14/9/2023).



**MEDIA**  
**KALTIM.com**  
Lebih Dekat dengan Satu Klik

## REHABILITASI JEMBATAN SAMBERA

- LOKASI JEMBATAN:**
  - Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak
  - Alternatif rute Bontang-Samarinda
- TIMELINE:**
  - Mulai pengerjaan: Juni 2023
  - Penutupan total: 23 September - 31 Desember 2023
- JALAN ALTERNATIF SELAMA PERBAIKAN:**
  - KM 08 Pipeline Pertamina
  - KM 10 Pipeline Pertamina
  - Lokasi: 2 km dari Jembatan Sambera
  - Kendaraan maksimal: 9 ton
- STATISTIK JEMBATAN :**
  - Lebar: 8 meter
  - Panjang: 60 meter
  - Biaya Rehab: Rp 11 miliar
- DETAIL KONSTRUKSI & MATERIAL:**
  - Diperkuat konstruksi bagian bawah
- Bahan:** Fiber Reinforced Polymer (FRP) meningkatkan kinerja balok hingga 30%
- Perlindungan:** Anti karat dan lumut (air asin di bawahnya)
- Rangka:** Baja Wide Flange
- Lantai:** Dari jenis bondeck beton jenis K350

**6. HARAPAN PASCA REHABILITASI:**

  - Jembatan yang lebih baik dan tahan lama
  - Masyarakat diminta membatasi kendaraan alat berat (8-10 ton)

**“Kita masih fokus menyelesaikan perbaikan. Nanti juga ada rencana jalan (Jembatan Sambera, Red.) di sana ditingkatkan menjadi jalan berstatus provinsi”**

**RESTU IRAWAN, Kabid Bina Marga DPU Kukar**

*Data : Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Diolah : mediakaltim.com, Grafis : Theopelus*

Jembatan yang juga sebagai jalan alternatif Bontang-Samarinda ini akan direhab senilai Rp 11 miliar. Jembatan yang memiliki lebar 8 meter dan sepanjang 60 meter ini, sudah diperkuat konstruksi bagian bawahnya sebelumnya. Menggunakan bahan Fiber Reinforced Polymer (FRP), serat karbon yang berfungsi untuk kekuatan struktur. Bahan ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan tarik pada balok, dengan harapan mampu meningkatkan kinerja balok hingga 30 persen.

Untuk menambah usia struktur bawah jembatannya, dicat menggunakan bahan anti karat dan lumut.

Karena air yang mengalir di bawahnya mengandung air asin. Rangka jembatan dilakukan dengan menggunakan baja Wide Flange. Lantai jembatannya pun akan diganti dan diberi kekuatan, yakni dari jenis bondeck diganti dengan kekuatan beton jenis K350.

Ketika jembatan sudah dibangun dan siap, diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat yang menginginkan Jembatan Sambera yang lebih baik lagi. Mengingat banyak warga Kecamatan Muara Badak yang mengeluhkan akses jembatan tersebut yang rusak parah.

Namun Restu menambahkan, mas-

asyarakat bisa bijak dan saling menjaga keberadaan jembatan tersebut. Yakni membatasi kendaraan alat berat 8-10 ton saja yang melewati. Karena jika melebihi beban yang seharusnya, akan berdampak langsung dengan kondisi jalan jembatan yang sudah dibangun dengan anggaran yang besar.

“Kita masih fokus menyelesaikan perbaikan. Nanti juga ada rencana jalan (Jembatan Sambera) di sana ditingkatkan menjadi jalan berstatus provinsi,” tutup Restu. (adv)

Penulis : Muhammad Rafli  
Editor : Nicha Ratnasari



Rangkaian kegiatan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XIV.

## Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Resmi Ditutup, Kepala BPSDM Harapkan Inovasi Terbaik dalam Pelayanan

**SAMARINDA** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) menutup Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIV, pada Selasa (12/9/23) di Ruang Aula Serbaguna Kantor BPSDM Kaltim.

Dalam laporan panitia penyelenggara, Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti menyampaikan, kegiatan ini telah terlaksana sejak 22 Mei hingga 12 September 2023.

PKP kali ini diikuti 40 peserta di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kelas Pemerintah Kota Samarinda.

Dalam sambutannya sekaligus menutup kegiatan PKP, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menekankan kepada para peserta yang telah mengikuti PKP bisa memberikan inovasi terbaik

yang dituangkan dan diimplementasikan yang kemudian tertulis dalam laporan Aksi Perubahan.

"Saya berharap inovasi yang saudara bisa memberikan dampak berkesinambungan dan memberikan dampak yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dan diharapkan akan terlahir kembali inovasi-inovasi lainnya tidak hanya sebagai pemenuhan syarat dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan saja, namun sebagai gerbang pembuka semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada masyarakat," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Nina Dewi berharap pada semua PKP bisa membuat proyek perubahan agar bisa menjadi referensi dan dapat diimplementasikan untuk memban-

tu kelancaran tugas khususnya guna meningkatkan layanan kepada masyarakat.

"Terakhir saya berharap kepada para peserta untuk bisa melakukan perubahan agar bisa membantu kelancaran dan meningkatkan layanan kepada masyarakat," tutupnya.

Diketahui, PKP ini diselenggarakan untuk membekali para peserta dengan kompetensi jabatan pengawas, baik wawasan, pola pikir, sikap, keahlian, upaya penyelesaian masalah, serta adanya gagasan inovasi. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang ASN telah mengamanahkan bahwa PNS memiliki hak minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun untuk pengembangan kompetensi. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Duta Bahasa KaltimTara 2023 Rona Safira Ihin (nomor 2 dari kiri) bersama Duta Bahasa lainnya.

## Duta Bahasa Kaltimtara Ajak Pemuda Kembangkan Budaya Literasi

**SAMARINDA** - Dalam memperingati Hari Kunjung Perpustakaan Nasional yang ke-28 pada 14 September 2023, Duta-Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) mengunjungi Perpustakaan Kaltim yang terletak di Jalan IR H Djuanda, Samarinda.

Dalam kunjungan tersebut, Duta Bahasa Kaltimtara 2023 Rona Safira Ihin tidak sendirian, gadis cantik ini bersama empat Duta Bahasa lainnya. "Kunjungan kami ini karena memperingati hari kunjungan perpustakaan," ujar Rona.

Gadis asal Desa Mara Satu, Kabupaten Bulungan Kaltara ini, mengatakan tujuan kunjungannya ke Perpustakaan Kaltim milik Badan

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim tersebut untuk membudayakan berkunjung ke perpustakaan agar mampu meningkatkan budaya literasi.

"Menumbuhkan budaya berkunjung ke perpustakaan," ujar Mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Fakultas Seni Budaya ini.

Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Rona dan rekannya ingin membuat konten video mengenai perpustakaan, yang intinya sebagai sarana untuk memperkenalkan perpustakaan dan mengembangkan literasi.

"Kita mau buat konten soal perpustakaan, jadi kita mau sosialisasikan lewat video konten, keunggulan-keunggulan perpustakaan, agar

menarik para pemuda agar mencintai perpustakaan," pungkasnya

Rona juga mengajak para pemuda meningkatkan busaya literasi sebagai penunjang pendidikan. "Pesan generasi muda, minat literasi harus ditingkatkan dan mulai dari hal-hal yang kita sukai," ajaknya.

Diketahui Hari Kunjung Perpustakaan diperingati sejak 14 September 1995, atas prakarsa Kepala Perpustakaan Nasional RI Pertama Mastini Hardjoprakoso dalam rangka untuk meningkatkan semangat literasi masyarakat dengan gemar melakukan kunjungan ke perpustakaan. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Murid-Murid SDN010 Samarinda Ulu saat masuk ke Perpustakaan yang dipandu petugas perpustakaan.

## Hindari Kecanduan Gawai, SDN 010 Samarinda Ulu Ajak Siswa ke Perpustakaan

**SAMARINDA**-Demi meningkatkan literasi di kalangan anak-anak, SDN 010 Samarinda Ulu mengajak 92 siswa kelas V mengunjungi Perpustakaan Kalimantan Timur (Kaltim) yang terletak di Jalan IrH Juanda Samarinda. Kunjungan yang dilaksanakan pada Kamis (13/9/2023) bertujuan agar menghindarkan murid dari kecanduan gawai.

Wali Kelas V SDN 010 Samarinda Ulu Desliana Trisnaini mengatakan kunjungan tersebut sengaja dilakukan untuk mengembangkan budaya literasi yang sempat terhenti lantaran wabah Covid-19 yang menyerang Indonesia khususnya Kaltim beberapa

tahun lalu.

"Karena Covid-19 banyak anak-anak hanya bermain HP di rumah, budaya literasi sangat kurang. Oleh sebab itu kami ajak ke perpustakaan ini, agar mereka banyak belajar di sini," ujarnya.

Selain itu, Desliana menambahkan tujuan kunjungannya ke Perpustakaan Kaltim adalah agar para siswa lebih dekat dengan perpustakaan Kaltim.

"Tujuannya yang pasti untuk mengembangkan kembali minat baca anak-anak. Makanya kita kenalkanlah perpustakaan ini, agar siswa-siswi belajar banyak mengenai perpustakaan. Bahkan di sini

sekarang sudah ada ruangan multimedia yang bisa mengembangkan minat anak-anak menjadi Youtuber tapi di bawah pengawasan orang tua," ujarnya.

Diketahui dalam kunjungan tersebut para siswa SDN 010 Samarinda Ulu diajak keliling ke ruangan-ruangan yang ada di perpustakaan.

"Jadi usai keliling anak-anak akan kita berikan tugas mengingat dan menceritakan ruangan apa saja yang sudah kita masuki tadi," ujar tutupnya. (adv)

Pewarta : Hanafi  
Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Ruangan Hemodialisa RSUD Taman Husada Kota Bontang yang sedang merawat pasien.

## Hemodialisa RSUD Taman Husada, Terima Layanan Cuci Darah bagi Anak-anak sejak 2021

**BONTANG** – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Kota Bontang telah menerima perawatan cuci darah bagi anak-anak. Cuci darah ini dilakukan di gedung Hemodialisa RSUD Taman Husada Kota Bontang.

Kepala Ruangan Hemodialisa, Salawatimenerangkan cucidarahbagi anak-anak sudah dilakukan sejak Maret 2021. Ia mengatakan saat ini telah melakukan cuci darah kepada 6 anak-anak sejak pelayanan pertama dilakukan.

"RSUD memiliki ruangan dialisis. Ruangan dialisis pelayannya ada he-

modialis dan CAPD. Hemodialisis itu cuci darah menggunakan mesin atau ginjal buatan," kata Salawati, kepada Mediakaltim.com, Kamis (14/9/2023).

Salawati melanjutkan bahwa pelayanan cuci darah atau hemodialisis telah dimulai sejak 2010. Dalam pelayannya pasien mendatangi rumah sakit dalam waktu satu atau dua minggu sekali untuk melakukan cuci darah. "Ada yang dua kali seminggu, ada juga tiga kali seminggu untuk hemodialisis," katanya.

Selain itu, pelayanan cuci darah

atau hemodialisis di RSUD telah memenuhi syarat kredensial seperti syarat kelayakan yang telah terpenuhi. "Ada pelayanan hemodialisis akut dan kronis yang dirawat di RSUD. Ada yang kami layani dewasa dan anak-anak. Jadi pelayanan anak itu berbeda atau bahannya yang berbeda ginjal buatan dewasa dan anak-anak," jelasnya. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo  
Editor: Nicha Ratnasari





# PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From <sup>Rp</sup>15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

## BEBAS PILIH MENU !

\*syarat dan ketentuan berlaku

[www.hotelgrandkartika.com/inspirasi](http://www.hotelgrandkartika.com/inspirasi)



TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih D... Satu Klik



KAPOLRES PENAJAM PASER UTARA  
**AKBP HENDRIK EKA BAHALWAN, S.H., S.I.K.**

**SEMANGAT  
MENGAYOMI**





MEDIAKALTIMGROUP

Tangkapan momen kunjungan Manajemen Media Kaltim Grup ke Kapolres PPU, AKBP Hendrik Eka Bahalwan.

## Pertemuan Media Kaltim Grup dan Kapolres PPU: Bahas Sinergitas Media, Penegakan Hukum hingga Peran UMKM

**PENAJAM** - Suasana hangat menyelimuti pertemuan antara Kapolres Penajam Paser Utara (PPU), AKBP Hendrik Eka Bahalwan, dengan Manajemen Media Kaltim Grup, Kamis (14/9/2023).

Meski berlangsung di ruang kerja yang formal, pertemuan tersebut dipenuhi canda tawa dan humor. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari "Roadshow Partnership Trip" Media Kaltim Grup.

Kunjungan dipimpin CEO Media Kaltim Agus Susanto dan Direktur Media Kaltim Rini Ernawati. Ikut mendampingi Kepala Biro MediaKaltim PPU, Robbi Sya'ian dan Jurnalis Radar Ibukota, Dedy Pz.

Mereka berdiskusi mengenai berbagai isu krusial, termasuk perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang dalam tahap pembangunan.

Pembahasan utama bagaimana membangun sinergitas antara media massa dengan penegakan hukum, yang juga menjadi salah satu prioritas kerja Polres PPU dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Kami selalu berupaya membangun komunikasi dan bahkan kolaborasi dengan awak media. Ini sangat membantu dalam pelaksanaan tu-

gas kamtibmas," ujar perwira dengan tanda pangkat melati dua tersebut.

Selain itu, ditekankannya, bahwa fokus kerja saat ini pada pengawalan pembangunan IKN, khususnya dalam mempersiapkan masyarakat lokal PPU agar dapat berperan aktif, terutama dalam sektor peningkatan perekonomian masyarakat.

"Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di PPU adalah keberadaan wadah yang memadai. Karena itu, kami berupaya memberikan tempat dan kesempatan bagi mereka untuk bersaing," ungkap Hendrik.

Hal tersebut juga menjadi pesan khusus kepada Manajemen Media Kaltim Grup agar turut membantu dalam mewujudkannya, khususnya da-

lam memberikan wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk mempromosikan produk mereka.

"Saya yakin, jika diberikan wadah yang memadai, pelaku UMKM di PPU dapat bersaing dengan produk-produk dari luar daerah yang akan hadir di IKN," tegasnya.

Isu tersebut hanya salah satu dari banyak hal yang dibahas dalam pertemuan. Hendrik juga mengapresiasi konsistensi Media Kaltim Grup dalam menyampaikan informasi kepada pembaca, khususnya di PPU.

Sebagai balasan, Media Kaltim Grup memberikan cinderamata berupa poster eksklusif dengan tulisan "Semangat Mengayomi", yang menggambarkan sosok Hendrik dalam menjalankan tugasnya. (SBK)





TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih D... Satu Klik



KEPALA DISKOMINFO PPU  
**KHAIRUDIN NISSE**  
**RAMAH**  
**BERSAHAJA**



MEDIAKALTIMGROUP

Penyerahan cinderamata berupa poster eksklusif dari Media Kaltim dengan tulisan “Ramah Bersahaja” kepada Kepala Diskominfo PPU, Khairudin Nisse.

## Media Kaltim Grup Sambangi Diskominfo PPU: Bahas Pengembangan Informasi Publik hingga Pemberitaan Berkualitas

**PENAJAM** - Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kerja dengan pemerintahan Benua Taka, Media Kaltim Grup berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (14/9).

Melalui program “roadshow partnership trip” ini, mempertemukan manajemen Media Kaltim Grup dengan Kepala Diskominfo PPU, Khairudin Nisse. Kunjungan dipimpin CEO Media Kaltim Agus Susanto, Direktur Media Kaltim Rini Ernawat, bersama Kepala Biro MediaKaltim PPU, Robbi Sya’ian serta Jurnalis Radar Ibukota, Deddy Pz.

Sebagai tanda penghargaan dan apresiasi, Media Kaltim Grup menyerahkan cinderamata berupa poster

eksklusif dengan tema “Ramah Bersahaja” kepada Khairudin. Poster tersebut menggambarkan sosok Khairudin, seorang pemimpin yang dikenal ramah dan bersahaja di Diskominfo PPU.

Mengawali pertemuan, Agus Susanto, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. “Meskipun Media Kaltim Grup baru berusia tiga tahun, kami berkomitmen menjadi jembatan informasi antara program dan kebijakan pemerintah dengan warga PPU,” ungkapnya.

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan ini, salah satunya mengenai pengembangan informasi publik di daerah yang dikenal dengan sebutan Benua Taka. Meskipun topik pembaha-

san cenderung serius, suasana pertemuan tetap santai dan penuh keakraban.

Sementara Khairudin Nisse menekankan pentingnya kerjasama dengan media dalam pembangunan daerah. “Pemberitaan yang objektif, transparan, dan sesuai regulasi sangat kami harapkan. Jika ada kritik untuk pemerintah, kami siap menerimanya sebagai bentuk kontrol dari masyarakat,” jelasnya.

Khairudin juga berharap agar para jurnalis senantiasa mengedepankan kode etik jurnalistik. “Kami selalu terbuka menerima masukan dan saran dari rekan-rekan media, terutama dari Media Kaltim Grup, untuk menciptakan sinergi dan kerja sama yang lebih efektif,” pungkasnya. (SBK)



TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih Del... Klik



KETUA BPC PHRI PPU

**SANDRY ERNAMURTI**

**AKTIF  
BERSINERGI**



MEDIKALTIMGROUP

Penyerahan cinderamata berupa poster eksklusif oleh Media Kaltim kepada Ketua BPC PHRI PPU, Sandry Ernamura, Kamis (14/9/2023).

## Media Kaltim Grup dan BPC PHRI PPU Kolaborasi Gali Potensi Pariwisata Jelang Pemindahan IKN

**PENAJAM** - Penajam Paser Utara (PPU) dikenal dengan potensi pariwisatanya yang menarik. Meski demikian, sepertinya masih kurang keseriusan dalam pengembangannya, terutama menjelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) PPU, Sandry Ernamura, dalam pertemuan dengan Media Kaltim Grup. Ikuti mendampingi Siska, Owner The Rich Hotel, yang juga anggota PHRI.

Sementara dari Media Kaltim Grup, rombongan dipimpin CEO Media Kaltim Grup Agus Susanto dan Direktur Media Kaltim Rini Ernawati bersama Kepala Biro PPU Media Kaltim Robbi Sya'fan, dan Redaktur Radar Ibukota Deddy Pz.

Padapertemuan yang berlangsung dalam rangka "Roadshow Partnership Trip" di Benuo Taka, Kamis (14/9/2023) di The Rich Hotel, Lawe-Lawe, kedua pihak menekankan pentingnya peran aktif media dalam pengembangan serta promosi pariwisata di PPU.

Sandry Ernamura mengungkapkan harapannya agar PPU dapat memanfaatkan potensi wisata yang dimilikinya dengan lebih maksimal, khususnya menjelang pemindahan

IKN. "PPU memiliki beragam potensi wisata yang menarik dan perlu strategi khusus untuk mempromosikannya," kata Sandry.

Salah satu isu yang ditekankan adalah pentingnya kebijakan dari pemerintah daerah guna mendorong perkembangan industri pariwisata.

"Pembangunan IKN di Sepaku telah dimulai. Ini adalah peluang yang harus kita manfaatkan. PPU memiliki nilai jual yang sangat menjanjikan, apabila disiapkan dengan matang," tuturnya.

Menurut Sandry, apabila pariwisata disiapkan dengan benar, investasi di bidang ini akan sangat signifikan mengingat potensi besar di PPU.

Penguatan industri pariwisata di PPU tidak hanya meningkatkan

perekonomian masyarakat, namun juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, pertemuan dengan manajemen Media Kaltim dianggap sebagai solusi penting. Peran media dalam menyebarkan informasi menjadi kunci dalam hal ini.

Selain memfokuskan isu-isu pariwisata lokal, media juga harus mengidentifikasi berbagai hambatan serta memberikan dukungan dalam promosi.

"Mengambil peran dalam memajukan daerah merupakan komitmen Media Kaltim Grup di PPU. Melalui pertemuan ini, kami berkomitmen bersama untuk mengawal isu-isu pariwisata, sejalan dengan pembangunan IKN," pungkas Agus Susanto. (SBK)





Prosesi menghanyutkan Parahu Alus di Sungai Kelay yang diantarkan oleh Wakil Bupati Berau Gamalis serta Sultan Sambaliung Datu Amir.

## Manguati Banua Jelang HUT Berau, Prosesi Adat agar Selamat dan Terhindar dari Mara Bahaya

**TANJUNG REDEB** - Menjelang hari jadi Kabupaten Berau yang ke-70 tahun dan Kota Tanjung Redeb yang ke-213 tahun, prosesi Manguati Banua dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau di Keraton Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kamis (14/9/2023).

Prosesi Manguati Banua dimulai dengan pemotongan puncak rasul, makanan khas Berau berupa ketan yang disusun seperti tumpeng yang datar. Yang di sekelilingnya terdapat telur yang ditancapkan dengan lidi. Pemotongan tersebut dilakukan oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, yang kemudian piring pertama diberikan kepada Sultan Sambaliung, Datu Amir.

Beralih ke dalam Keraton Sambaliung, para pejabat beserta tokoh adat melakukan doa bersama sesuai ajaran agama Islam. Memohon agar senantiasa diberikan keselamatan dan terhindar dari mara bahaya.

Sebab, Kesultanan Sambaliung merupakan salah satu kerajaan yang menjunjung tinggi syariat Islam. Mulai dari keturunan awal sampai saat ini adalah insan yang taat beragama.

Setelah makan bersama, Manguati Banua ditutup dengan mengarak Parahu Alus atau menghanyutkan perahu kecil yang berisi satu sisir pisang dan satu butir telur yang telah

diberi doa oleh tetua adat Sambaliung.

Perahu kecil tersebut kemudian dihanyutkan di Sungai Kelay. Wakil Bupati Berau Gamalis beserta Sultan Sambaliung turut mengantarkan perahu kecil tersebut ke tengah sungai.

Tujuannya, setelah perahu diantar masyarakat Berau selain dihilangkan dari segala penyakit, juga mensejahterakan kehidupan orang Banua. Diharapkan masyarakat dapat bersatu dalam Manguati Banua untuk kemajuan Berau dengan diantar perahu alus ke sungai itu.

"Tradisi tersebut merupakan awal dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Berau yang ke-70 tahun," kata Bupati Berau Sri Juniarsih, Kamis (14/9/2023).

Ia berharap prosesi adat tersebut dapat terlaksana setiap tahun dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, bukan hanya yang berada di empat kecamatan terdekat saja. Supaya semua dapat merasakan kemeriahan hari jadi Berau tercinta.

"Ini merupakan upaya pelestarian adat budaya asli Berau. Kami sadar budaya bukan hanya bertujuan mempertahankan adat istiadat tapi juga menjadi daya tarik wisata yang otentik di Berau," terangnya.

Sri berkomitmen akan terus menjaga potensi wisata tersebut agar

dapat dikembangkan dan tentunya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Berau.

Dengan meningkatnya pariwisata Berau pastinya akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Bumi Batiwakkal. Yang datang untuk melihat kebudayaan asli Berau.

"Bukan hanya itu, UMKM juga akan semakin baik ke depan. Sehingga kesejahteraan masyarakat Berau juga meningkat," ucapnya.

Program pelestarian adat budaya bahari terus dilakukan agar budaya asli Berau dapat dijaga. Peringatan hari jadi Berau menjadi momentum untuk merawat adat budaya tersebut.

Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Syarifatul Syadiyah pun memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam prosesi Manguati Banua. Terutama kepada Kesultanan Sambaliung yang tetap menjaga adat istiadatnya selama ini.

"Karena acara ini rutin tahunan, harapan kami Kesultanan Sambaliung dengan adat-adat ini tetap kita tonjolkan, kita jaga dan rawat sebaik-baiknya karena inilah Berau dengan dua kesultanan, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur," ungkapnya.

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Nicha Ratnasari



Kendaraan roda empat resmi diperbolehkan melintas di Jembatan Sambaliung.

## Roda Empat Resmi Diizinkan Melintas Jembatan Sambaliung, Bobot Maksimal 4 Ton

**TANJUNG REDEB** - Jembatan Sambaliung secara resmi telah dibuka bagi kendaraan roda empat. Namun, masih diberi batas bobot maksimal 4 ton lantaran kekuatan jembatan masih 85 persen.

Pembatas jalan juga terlihat masih terpasang di kedua ujung jembatan untuk menghalangi mobil besar yang lewat.

Dengan mengucapkan shalawat dan memegang bendera, Bupati Berau Sri Juniarsih meresmikan Jembatan Sambaliung tersebut. Ratusan kendaraan tampak memadati jembatan usai diresmikan.

Dikatakannya, pembukaan Jembatan Sambaliung itu menjadi momentum hadiah bagi ulang tahun Kabupaten Berau yang ke-70 tahun.

Ia juga meminta masyarakat untuk

tetap berhati-hati karena jembatan belum sepenuhnya dibuka untuk umum. Terutama bagi kendaraan besar dengan muatan lebih dari 4 ton masih menyeberang menggunakan Landing Craft Tank (LCT).

"Kekuatan jembatan baru 85 persen. Masyarakat tetap harus berhati-hati," katanya, Kamis (14/9/2023).

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau Madri Pani menuturkan, dibukanya Jembatan Sambaliung sudah menjadi kewajiban. Berbagai sektor perlahan akan mulai kembali pulih. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan hingga perekonomian masyarakat.

"Dengan dibukanya akses jembatan ini berarti membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai

aktivitas seperti sebelumnya," ungkapnya.

Dirinya juga menaruh simpati dengan kejadian beberapa waktu lalu, ketika jenazah warga Sambaliung terpaksa ditandu melewati Jembatan Sambaliung. Sebab ambulans belum diperbolehkan melintas.

"Kasihannya juga harusnya ada pengecualian kalau memang dilarang melewati. Dan harus ada penjaganya karena itu kan proyek besar," tegasnya.

"Mudah-mudahan dengan diperbolehkannya roda empat melintasi Jembatan Sambaliung ini perekonomian masyarakat di pesisir Berau dapat kembali," harapnya.

Pewarta: Amnil Izza  
Editor: Nicha Ratnasari



Tim advokasi warga Desa Telemow, Sepaku saat mendampingi warga Desa Telemow diperiksa di Polda Kaltim perihal laporan dari PT ITCI Kartika Utama tentang penyerobotan lahan.

## Dituding Serobot Lahan Perusahaan, Warga Desa Telemow Diperiksa di Polda Kaltim

**BALIKPAPAN** - Warga Desa Telemow, Sepaku, Penajam Paser Utara saat ini tengah menghadapi konflik agraria dengan PT ITCI Kartika Utama, dan berujung pada dilaporkannya sejumlah warga Desa Telemow ke Polda Kaltim atas tuduhan penyerobotan lahan.

Pada Kamis (14/9/2023) sekitar pukul 13.00 wita, tiga orang warga Desa Telemow di antaranya Sakius Sape, Marthen Sulo dan Titus Tomangke pun memenuhi panggilan penyidik Ditkrimum Polda Kaltim. Ketiga warga tersebut pun didampingi oleh LBH Tanah Untuk Rakyat dan Walhi Kaltim.

Salah satu tim advokasi warga, Fathul Huda mengatakan, permasalahan ini sebenarnya sudah pernah terjadi di Polres PPU pada tahun 2019. Namun karena tidak ada kejelasan, Polda Kaltim pun menarik kasus ini. Dan baru saat ini warga kembali dimintai keterangan penyidik.

"Hari ini harusnya yang diperiksa

itu ada 5 warga Desa Telemow. Tapi karena satu sakit dan satu sedang kerja di luar pulau, maka yang bisa hadir cuma 3 orang aja," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut Fathul menjelaskan, tuduhan yang disematkan kepada warga Desa Telemow diyakininya sangat tidak mendasar dan diduga ada upaya perampasan lahan milik warga untuk kepentingan investasi perusahaan PT ITCI Kartika Utama.

"Masyarakat di sana itu lebih dulu ada dari pada perusahaan itu. Jadi dari mana ceritanya jika masyarakat ini yang mengambil lahan PT ITCI Kartika Utama," jelasnya.

Ditambahkan Ardiansah, yang juga tim advokasi warga mengaku, saat ini warga memegang legalitas tanahnya berupa segel dan surat keterangan penguasaan tanah (SKT). Bahkan banyak saksi hidup yang mengetahui riwayat tanah dan warga pribumi di sana.

"Sempat dikatakan juga oleh pihak

perusahaan bahwa di sana ada mafia tanah yang menjual belikan lahan Desa Telemow kepada para pendatang. Ini nggak benar," tegasnya.

Ardiansah menjelaskan, masyarakat setemoat akan tetap bertahan dan tidak akan pergi meski ada iming-iming dari pemerintah dan perusahaan.

Untuk itu tim advokasi warga berharap ada klarifikasi dari warga setempat, bahwasannya warga tidak pernah merebut atau mengambil bahkan masuk dalam kawasan lahan milik PT ITCI Kartika Utama.

"Kami mewakili warga dan masyarakat di sana memiliki hak yang sama sebagai warga negara juga. Berhak untuk mendapat kehidupan yang layak dan mencari ekonomi juga," tutupnya.

*Penulis: Aprianto*

*Editor: Nicha Ratnasari*



# Soal Karhutla, Polda Kaltim Belum Temukan Pelaku Pembakaran Hutan

**BALIKPAPAN** - Polda Kaltim mencatat kasus kebakaran hutan dan lahan (Karahutla) di Kalimantan Timur hingga September 2023 mencapai 108 kejadian. Dan hingga saat ini Karhutla terbanyak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan total 45 kasus.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah Kukar disusul Kubar 29 kejadian dan Berau 20 kejadian. Namun dari seluruh kasus tersebut, hingga kini belum menemukan satu orang pun pelaku pembakaran hutan yang diduga sengaja melakukan pembukaan lahan.

"Saat personil tiba di lokasi kebakaran nggak satupun orang atau diduga yang membakar itu berada di titik munculnya api," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan,

selain menemukan pelaku pihaknya juga kesulitan untuk mencari saksi. Pasalnya, lokasi yang terbakar jauh dari pemukiman atau jangkauan warga. "Jauhnya jangkauan lokasi kebakaran hutan membuat petugas memakan waktu cukup lama untuk tiba di titik api," jelasnya.

Hal itu diduga menjadi kesempatan para pelaku untuk melarikan diri usai melakukan pembakaran. Alhasil kepolisian yang tiba di lokasi kebakaran pun melakukan upaya-upaya lainnya seperti membantu petugas damkar melakukan pemadaman api bersama-sama. "Rata-rata lahan yang terbakar ini berada jauh dari pemukiman warga di tengah hutan," tambah Yusuf Sutejo.

Selain itu, kepolisian juga melakukan tindakan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan

kebakaran ataupun daerah dengan titik hotspot terbanyak di Kaltim.

Upaya-upaya itu berupa pemasangan papan himbauan yang dipasang di lokasi rawan kebakaran dan di pemukiman warga agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Mengingat pula musim kemarau panjang serta El-Nino saat ini berpotensi menimbulkan api akan semakin mudah merambat ke lokasi lainnya terutama di daerah-daerah yang mengalami kekeringan. "Sempat kemarin berpatroli jarak jauh beberapa waktu lalu langsung dengan bapak Kapolda. Itu sengaja kita lewat darat untuk memantau langsung bagaimana situasi di daerah," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari

**SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN**  
\* TOYOTA MOTOR OIL

**Khusus Taxi Online & Travel**

**GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE**

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

Drusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang



Korban AL pesepeda motor yang tewas usai menabrak truk sampah milik DLH Balikpapan di Jalan Mayjend Sutoyo pada Kamis dini hari.

## Pengendara Motor Tewas Usai Hantam Truk DLH di Gunung Malang

**BALIKPAPAN** - Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan tewasnya pengendara, kembali terjadi di Kota Balikpapan pada Kamis (14/9/2023) dini hari tadi. Kecelakaan terjadi di Jalan Mayjend Sutoyo, Balikpapan Tengah.

Dalam kecelakaan ini seorang pengendara sepeda motor berinisial AL (22) tewas saat dilarikan ke rumah sakit usai dirinya menghantam sebuah truk dari arah berlawanan.

Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Koptol Ropiyani membenarkan kejadian tersebut saat dikonfirmasi. Di mana insiden kecelakaan maut itu melibatkan kendaraan sepeda motor KT 6775 HC yang dikemudikan AL dengan truk pengangkut sampah milik DLH bernomor polisi KT 8608 A yang dikemudikan SH (46).

Kecelakaan bermula saat AL melintas dari arah Hotel Marbo menuju simpang traffic light Gunung Malang. Saat tiba di jalan menikung ke kiri tepatnya di depan Gudang Bulog Balikpapan. AL kehilangan kendali

sepeda motornya hingga keluar dari jalur kendaraan.

"Korban masuk ke jalur sebelahnya dan menabrak bagian depan truk sampah yang datang dari arah berlawanan," ujarnya.

Lebih lanjut Ropiyani menjelaskan, akibat dari tabrakan itu korban AL mengalami sejumlah luka pada bagian kaki dan kepalanya. Korban pun saat itu sempat dibawa menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Namun nahas, baru beberapa jam nyawa korban tak tertolong.

"Korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit," jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Sudirman turut membenarkan peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan truk pengangkut sampah milik DLH itu.

Dirman mengaku truk sampah yang terlibat kecelakaan dini hari tadi baru saja mengangkut sampah dari bak sampah yang berada di depan Gajah Mada Store di Jalan Mayjend

Sutoyo.

Saat hendak melanjutkan perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman. Pengemudi truk sampah milik DLH melihat motor yang dikemudikan AL melaju dengan kecepatan tinggi dan melebar ke jalur truk saat berada di jalan menikung.

"Sopir ini sempat berusaha untuk menghindar. Tapi karena motor sewaktu kejadian cukup kencang, tabrakan nggak bisa dihindari," ujar Sudirman.

Setelah terlibat kecelakaan, pengendara sepeda motor AL pun terpelanting hingga masuk ke dalam parit di pinggir Jalan Mayjend Sutoyo. AL masih sadar dan sempat berkomunikasi saat masih berada di parit.

Kendati demikian, nyawa AL tak tertolong meski sempat mendapat perawatan medis dari rumah sakit akibat mengalami luka cukup serius pada bagian kepalanya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Kegiatan patroli rutin satpol PP.

IST

## Patroli Rutin, Satpol PP Masih Temukan Poster Caleg

**BONTANG** - Satpol PP Kota Bontang mencopot poster-poster caleg yang dipasang tanpa izin dalam kegiatan patroli rutin. Kepala Bidang PPUK Satpol-PP, Eko Mashudi mengatakan bahwa masih ada caleg yang memasang poster di pinggir-pinggir jalan walaupun tidak dalam jumlah banyak.

"Pagi ini kami melakukan patroli dan masih mendapati poster caleg," jelasnya saat dihubungi redaksi, Kamis (14/9/23).

Tidak ada aduan terkait poster

tersebut, dan bukan hanya poster caleg saja, setiap spanduk yang terpasang tidak pada tempatnya akan ditertibkan, termasuk perizinan pemasangan reklamenya.

Eko mengatakan penumpukan poster dan spanduk caleg sempat terjadi, namun pihaknya telah bersurat ke pimpinan partai politik terkait agar tidak memasang spanduk tanpa izin.

"Jumlah spanduk yang kami dapat jauh menurun dari sebelumnya, sebelum kami bersurat pada setiap pimpinan Parpol untuk mengurus

perizinan pemasangan reklame atau baliho," tambahnya.

Ia juga mengatakan tidak ada sanksi yang berat untuk parpol terkait. Hanya saja poster atau spanduk mereka akan dicopot jika didapati di lokasi.

"Hal seperti ini sering terjadi tiap menuju pemilihan, hanya saja harus tetap mengikuti aturan yang ada," imbuhnya.

Penulis: Syakurah

Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Nampak capaian pengerjaan terminal Kilometer 6 Kota Bontang.

## Pembangunan Gedung Terminal Km 6 Capai 37,43 Persen, Ditarget Rampung Akhir Tahun

**BONTANG** – Pengerjaan bangunan Terminal Kilometer (Km) 6 Kota Bontang sampai saat ini berjalan. Disebutkan pengawas konsultan progres pengerjaan sudah mencapai 37,42 persen.

Pengawas konsultan CV Arori Teknika, Ambo Rio menjelaskan progres pengerjaan di lapangan saat ini telah mencapai hingga 37,42 persen hingga September 2023. Ia mengatakan target pengerjaan hingga akhir tahun ini di bulan November.

“Kami optimis dalam penyelesaian tahun ini yang jelas bisa selesai. Harus selesai tahun ini,” katanya saat dikonfirmasi [Mediakaltim.com](http://Mediakaltim.com) via telepon, Kamis (14/9/2023).

Ambo menyebutkan pelaksanaan selalu dipantau dan dikoordinasikan

oleh pelaksana proyek dan konsultan. “Untuk pembangunannya gedung utama, kantin, tempat genset hingga gapura,” katanya.

Sementara Kepala Terminal Km 6, Zainuddin mengatakan pengerjaan saat ini masih sesuai dengan jadwal. Namun ia mengatakan untuk rincian pengerjaan semuanya dilaporkan ke Dinas Perhubungan Provinsi atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Saya sifatnya di sini hanya memantau saja. Lapornya semua diberikan ke Samarinda antara konsultan pengawas dan PPTK-nya karena ini pengerjaan bangunan provinsi,” kata Zainuddin.

Ia menambahkan gedung utama terminal akan dibangun dengan lan-

tai dua bersama bangunan kantin dan ruangan genset hingga gapura. “Sebenarnya November target pengerjaan. Yang jelas tahun ini selesai. Semoga tahun depan bisa digunakan,” kata Zainuddin ditemui [Mediakaltim.com](http://Mediakaltim.com).

Diinformasikan bahwa dari plang pembangunan proyek tertulis pembangunan terminal tipe B yang dianggarkan dari APBD provinsi tahun 2023 dengan nilai pembangunan gedung terminal sebesar Rp 13 miliar lebih dengan kontraktor pelaksana PT Hikmah Aldina Prima dan pengawas konsultan dari CV Arori Teknika.

*Pewarta: Yahya Yabo*

*Editor: Nicha Ratnasari*





Bendungan Marang Kayu, Kutai Kartanegara

## Pembebasan Lahan Bendungan Marang Kayu, Banyak Warga Belum Terima Kompensasi

**KUKAR** - Persoalan pembebasan lahan Bendungan Marang Kayu masih menjadi polemik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal demikian ditanggapi sejumlah legislator baik DPRD Kaltim dan DPR RI.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, meminta warga yang merasa belum mendapatkan haknya untuk bersurat ke DPRD Kaltim untuk dapat ditindaklanjuti dengan rapat dengan sejumlah stakeholder terkait.

Politisi PAN ini mengungkapkan, sejak dirinya masih menjabat sebagai Kepala Desa 2006 lalu, hanya segelintir masyarakat yang mendapatkan haknya. Selebihnya masih banyak warga yang belum diberikan kompensasi pembebasan lahan.

"Harus segera diselesaikan, yang kasihannya lagi banyak pemilik lahan itu yang sudah meninggal, sekarang yang melanjutkan perjuangan itu anak-anak mereka," jelasnya kepada awak media, Kamis (14/9/2023).

"Kalau ada surat masuk setidaknya kami bisa tindaklanjuti itu dengan pertemuan, kemudian mengundang lembaga-lembaga terkait termasuk Pemprov Kaltim dan LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara)," sambungnya.

LMAN sendiri sebutnya, kini menjadi penanggungjawab pembebasan lahan warga untuk pembangunan Bendungan Marang Kayu. Sebelumnya soal pembebasan lahan ini

merupakan kewajiban dari Pemprov Kaltim.

"LMAN ini bisa mengurai apa yang menjadi kendala pembebasan lahan ini masih belum tuntas, dari uraian masalah itu mereka seharusnya bisa berikan solusinya," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan, telah meninjau progres pembangunan Bendungan Marangkayu beberapa waktu lalu. Bendungan ini sebutnya, telah mangkrak sejak 2007 karena terkendala pada persoalan sosial.

Padahal menurutnya, selain dapat mengatasi persoalan irigasi untuk pertanian di Marangkayu, Bendungan ini dapat menyuplai kebutuhan air bersih hingga Kota Bontang. Untuk itu ia mendorong, pemerintah dapat segera mengentaskan persoalan sosial, yang masih menyandera hak-hak dari masyarakat setempat.

Mengingat Bendungan Marangkayu adalah proyek strategis nasional, ia mendorong pemerintah pusat segera mengentaskan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini.

"Ini PR pemerintah Jokowi, kalau ini tidak tuntas pemerintah Jokowi gagal," ujarnya.

Sementara Kepala Desa Sebuntal, Herman, menjelaskan kurang lebih 16 tahun sudah pembebasan lahan Bendungan Marangkayu belum klir. Sehingga ia mendorong penyelesaian lahan yang belum dibebaskan

agar tidak menimbulkan gejolak lebih besar di tengah warga Sebuntal.

"Apa-apa yang menghambat permasalahan lahan agar segera diselesaikan karena ini (bendungan) sangat dinantikan untuk irigasi masyarakat," ucapnya.

Ia pun berharap ada pendampingan dari pemerintah terkait pembebasan lahan, mengingat warga banyak yang tidak memahami soal hukum. "Kami harap ada bantuan dari Kementerian PUPR atau pusat untuk warga kalau memang proses ke pengadilan," tukasnya.

Sebagai informasi bendungan dengan luas 678,59 hektare ini memiliki dua tahap penggenangan yakni 107 meter dan 110 meter. Sejak tahun 2020 silam sudah ada empat kali pembayaran yakni pada 15 Oktober 2020 sebanyak 35 bidang, 9 Februari 2021 sebanyak 5 bidang, dan 14 Februari sebanyak 54 bidang. Adapun ujaranya, masih ada 100 hektare lagi yang belum terbayarkan untuk area penggenangan tahap pertama.

Salah satu faktor lambannya proses pembayaran adalah tumpang tindih lahan antara warga dan perusahaan. Ada sembilan titik sumur minyak dari SKK Migas dan satu tower SUTT yang masuk dalam area bendungan.

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnaari



ISTIMEWA

Penampilan salah satu peserta lomba Tari Jepen dalam rangkaian Festival Kota Raja (FKR) Tenggarong.

## Semarak FKR 2023, Upaya Lestarikan Budaya Lokal Kukar

**TENGGARONG** - Festival Kota Raja (FKR) 2023 sedikit lebih berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kali ini lebih menonjolkan kearifan lokal dan kelestarian budaya lokal Kutai. Tentunya, acara ini semakin meriah dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beragam kegiatan disajikan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-241 Tenggarong sejak tanggal 10-16 September 2023 mendatang. Di antaranya, Lomba Jepen antar OPD dan kecamatan, Lomba

Baju Miskat, Gowes Wisata Idaman, Zumba Party, Lomba Senam Kreasi, Lomba Kuliner, Lomba Bertarsul dan Lomba Ngapeh (bercerita).

"Bedanya sekarang banyak kontennya, dengan menonjolkan kearifan lokal dan kelestarian budaya Kutai," ungkap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Slamet Hadiraharjo, Kamis (14/9/2023).

Tidak seperti tahun sebelumnya yang lebih kepada komunitas untuk tampil. Seluruh OPD pun kini saling unjuk gigi, dalam menampilkan karya Tari Jepennya. Selain memajukan budaya lokal Kutai, juga mempererat

tali silaturahmi dan meningkatkan partisipasi antar OPD.

Slamet pun optimis, FKR 2023 yang memakan anggaran hingga Rp 300 juta ini, bisa berdampak luas bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kukar yang berjualan di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong, sebagai venue acara sepekan kedepan.

"Harapannya tembus ratusan juta, dalam sepekan ini bisa mencapai Rp 500 juta," tutup Slamet.

*Penulis : Muhammad Rafi'i*

*Editor : Nicha Ratnasari*

**Koran DIGITAL**  
**MEDIA KALTIM.com**  
Lebih Dekat dengan Satu Klik

<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN  
CP. 0811 5405 033

media\_kaltim    mediakaltimdotcom    mediakaltim.com    media kaltim



Penyaluran beras BPN oleh Kancapem Perum Bulog.

## Bulog Segera Salurkan Ratusan Ton Beras Program BPN di Paser

**PASER** - Program penyaluran Bantuan Pangan Nasional (BPN) oleh Pemerintah Pusat melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) bakal kembali disalurkan untuk Kabupaten Paser.

Penyaluran berupa beras itu nantinya merupakan tahap kedua yang direncanakan pada September 2023 ini. Sebelumnya, sebanyak 397 ton beras sudah disalurkan ke masyarakat Kabupaten Paser. Bantuan itu disalurkan pada April hingga Juni 2023 lalu.

"Selanjutnya tahap II kemungkinan pada September ini dimulai," kata Kepala Kantor Cabang Pembantu Perum Bulog Tanah Grogot, A. B. Mukti Wibowo, Kamis (14/9/2023).

Berbeda dari tahap pertama, untuk di tahap kedua ini, Kancapem Perum Bulog Tanah Grogot, bakal menyalur-

kan 655 ton, namun untuk 2 Kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.

Mukti menyebut, penyaluran dipastikan terlaksana setelah pihaknya mendapat rekomendasi dari masing-masing Pemerintah Kabupaten (Pekab) setempat. Sementara terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pihaknya turut menunggu dari Pekab pula.

"Untuk tahap dua ini ada 655 ton yang disalurkan kepada KPM di 2 Kabupaten," ungkapnya.

Dalam penyaluran ini, Kancapem Perum Bulog Tanah Grogot menggaet anak usaha Perum Bulog yaitu PT Jasa Prima Logistik (JPL) yang akan mendistribusikan ke KPM. Sementara data penerima ditentukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI yaitu yang masuk dalam KPM.

Tiap KPM, dijelaskan Mukti, akan menerima tiga kali dan tiap penerimaan jumlahnya mencapai 10 kilogram (kg) beras. Mukti menargetkan September 2023 ini sudah mulai diluncurkan dan penyaluran.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Paser, Taharuddin menyampaikan, dalam waktu dekat akan diumumkan penyaluran, beserta jadwal penyaluran. Ia memastikan September, Oktober, dan November 2023 merupakan jadwal penyaluran.

"Kita masih menyesuaikan jadwal pimpinan di daerah agar hadir saat launching," kata Taharuddin.

*Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari*



Proses penanggulangan karhutla oleh petugas.

## Polisi Ingatkan Warga Soal Sanksi Buka Lahan dengan Cara Membakar

**PASER** – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Paser mencatat, sebanyak 91 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terjadi di Kabupaten Paser, hingga pertengahan September 2023 ini.

Dari total kasus tersebut, luasan lahan yang terbakar mencapai 300,85 hektare yang tersebar di 10 Kecamatan. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Paser, Ruslan menyebut, kasus kebakaran yang terjadi diduga disebabkan adanya unsur kesengajaan oleh oknum masyarakat.

“Memang ada unsur sengaja oleh masyarakat, melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar,” kata Ruslan, saat dikonfirmasi, Selasa (12/9/2023) lalu.

Sementara, meluasnya kebakaran yang kerap terjadi, ditambahkan Ruslan, karena pada proses pemadaman juga dihadapkan dengan kendala. Kendala itu di antaranya peralatan yang terbatas dan ketersediaan air yang sulit didapatkan khususnya di lokasi pemadaman terdekat.

“Kendalanya itu berupa embung yang jauh dari titik kebakaran. Termasuk debit air sungai mulai mengering,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resort (Polres) Paser, IPTU Helmi Septi Saputro menyatakan, hingga kini pihaknya masih terus menyelidiki kasus karhutla yang marak terjadi.

“Masih penyelidikan. Ya kami masih cek cek saja,” kata Helmi saat dihubungi, Kamis (14/9/2023).

Kendati belum ada tersangka dari sederet kasus itu, Helmi tetap mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika terbukti, tentunya hal itu akan berdampak pada jeratan pidana bagi pelaku.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pada pasal 50 ayat 3 huruf d, bahwa ancaman hukumannya 15 tahun penjara atau denda Rp5 miliar,” tegas Helmi.

Diketahui, Kabupaten Paser telah menetapkan siaga darurat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) RI nomor 11 tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Karhutla, sejak Senin 24 Juli 2023 lalu.

Dari 91 kasus yang terjadi, Keca-

matan Tanah Grogot tercatat sebagai wilayah dengan kejadian terluas mencapai 169 hektare dengan 44 kejadian. Sementara wilayah terluas kedua yaitu Kecamatan Long Kali mencapai 57,65 hektare dengan 7 kejadian.

Berbeda dengan Kecamatan Paser Belengkong dengan luasan yang terbakar mencapai 41,6 hektare namun dengan 8 kejadian. Di Kecamatan Muara Samu, luasan wilayah yang terbakar mencapai 10,92 hektare dengan 6 kejadian.

Di Kecamatan Long Ikis luasan wilayah yang terbakar mencapai 5,7 hektare dengan kejadian. Uniknya, di Kecamatan Batu Engau luasan wilayah yang terdampak hanya 5,48 hektare namun peristiwa kebakarannya mencapai 13 kejadian.

Sementara Kecamatan Tanjung Harapan luasan wilayah yang terbakar mencapai 5 hektare dengan jumlah 3 kejadian. Di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Kuaro kasus kebakaran mencapai 1 hektare dan 0,5 hektare yang masing-masing 1 kejadian.

*Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari*





Direktur Perumdam Tirta Kandilo, Suryanto Agustono

## Ketersediaan Air Bersih Aman Meski Masih Musim Kemarau

**PASER** - Penyaluran air bersih bagi pelanggan di Kabupaten Paser, dipastikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kandilo berlangsung normal meski kemarau panjang belum berakhir.

Direktur Perumdam Tirta Kandilo, Suryanto Agustono memastikan, walau ketersediaan air masih terbilang minim, namun distribusi air bersih ke seluruh pelanggan sudah berjalan. Sementara kendala air baku tengah dibenahi.

Kami siapkan alat pompa portable dipinggir sungai. Karena kemarin permukaan air tidak mampu mencapai WTP. Jadi kita buat solusi seperti itu," kata Suryanto, Kamis

(14/9/2023).

Sementara terhadap ketersediaan air untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Kecamatan Tanah Grogot, juga ia pastikan tidak mengalami kendala.

"Untuk BPBD, Dinsos sudah kita layani dan penuh kepada masyarakat yang membutuhkan, baik di kecamatan dan semua berjalan lancar," urai Suryanto.

Ia mengaku sempat ada pembatasan penyediaan air ke masyarakat umum di Kecamatan Long Kali. Sebab Perumdam Tirta Kandilo lebih mengutamakan masyarakat yang sudah menjadi pelanggan.

"Ada jam-jam tertentu yang tidak kita izinkan untuk mengambil air di Long Kali, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan," kata Suryanto.

Distribusi air bersih di Kecamatan Tanah Grogot juga sempat mengalami kendala, bahkan air yang diterima konsumen keruh, dan sering macet di masa transisi ke musim kemarau. Dijelaskannya kini sudah tangani dan tindaklanjuti.

"Alhamdulillah sudah berjalan lancar distribusi air ke rumah warga Tanah Grogot," ungkapnya.

Pewarta : Bhakti Sihombing  
Editor : Nicha Ratnasari



## Sudah Terbit SK, Makmur Marbun Dikabarkan Jadi Pj Bupati PPU Gantikan Hamdam

**PPU** - Meskipun Pemprov Kaltim masih menunggu kepastian mengenai Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun nama yang kemungkinan akan mengisi posisi tersebut sudah mencuat. Bahkan sudah diterbitkan SK Mendagri.

Yaitu, Makmur Marbun, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

Diketahui bahwa masa jabatan Bupati PPU, Hamdam, akan segera berakhir pada tanggal 19 September 2023. Hamdam Pongrewa telah menjabat sebagai Bupati PPU sejak tahun 2022 dalam periode kepemimpinan 2018 hingga 2023.

“Sudah ditetapkan calon terpilih dan sudah ada Surat Keputusan (SK) terkait hal ini, yaitu Makmur Marbun,” ujar sumber Media Kaltim di Kemendagri.

Sebelumnya, pada tanggal 7 Agustus 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU telah mengusulkan beberapa nama calon Pj Bupati PPU yang akan menggantikan Hamdam Pongrewa kepada Pemprov Kaltim. Usulan mengenai nama-nama tersebut juga telah disampaikan ke Kemendagri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari 3 nama yang diusulkan, diketahui salah satu di antaranya berasal dari lingkup Pemprov Kaltim, yaitu Agus Hari Kesuma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

Sedangkan dua kandidat lainnya adalah Suhardi, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD PPU, dan Adriani Amsyar, yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik di Sekretariat Pemda PPU.

Nama-nama yang telah diajukan ke Kemendagri melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor termasuk Agus Hari Kesuma, Kepala Dispora Kaltim, serta

Deni Sutrisno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, dan Christianus Benny, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesra.

Sementara itu, nama Makmur Marbun tidak termasuk dalam usulan baik dari DPRD PPU maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri 4/2023 tentang Penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Drs. Makmur Marbun, M.Si, yang lahir di Pakkat, Sumatera Utara pada tanggal 10 September 1964, saat ini berusia 57 tahun dan telah menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Otonomi Daerah sejak tanggal 18 Agustus 2020 hingga saat ini.

“Kabarnya juga, hari ini sudah berangkat ke PPU. Persiapan untuk pelantikan Minggu depan,” sebut sumber dari Kemendagri. (SBK)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua DPD Partai Gelora PPU, Mujahid saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

## Pj Bupati PPU Lokal atau Bukan, Mujahid; Yang Penting PPU Maju Bersama IKN

PPU - Tinggal beberapa hari lagi periode kepemimpinan Hamdam Pongrewa sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) habis. Ketua DPD Partai Gelora PPU, Mujahid menilai yang terpenting ialah kemampuannya.

Terhitung 18 September 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menunjuk penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan kepala daerah Benuo Taka. Hingga kini, Pemprov Kaltim masih menunggu kepastian mengenai nama yang bakal ditunjuk.

"Pertama yang harus Kita mengerti itu adalah hak prerogatif dari pemerintah pusat. Untuk menentukan representasi pemerintah pusat di daerah," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Seperti diketahui sesuai aturan, pemerintah daerah melalui DPRD PPU dan Pemprov Kaltim berhak untuk mengusulkan sosok yang cocok. Masing-masing mengajukan 3 nama secara berjenjang.

Dari 3 nama yang diusulkan DPRD PPU, yaitu Agus Hari Kesuma, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Suhardi yang menjabat

sebagai Sekretaris DPRD PPU, dan Adriani Amsyar yang merupakan Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik di Setkab PPU.

Sementara nama-nama yang diajukan ke Kemendagri melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Isran Noor ialah Agus Hari Kesuma, Kepala Dispora Kaltim, serta Deni Sutrisno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, dan Christianus Benny, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesra.

Adapun belakangan, banyak kalangan yang memandang tokoh lokal Kaltim merupakan pilihan yang tepat untuk mengisi posisi Pj tersebut. Walau begitu, Mujahid menegaskan siapapun yang dipilih nantinya wajib memiliki hal positif.

"Saya pikir Kita nggak perlu terjebak soal lokal ataupun tidak lokal. Yang pertama karena keputusan itu bukan keputusan politis. Kita tetap harus menghargai undang-undang. Mungkin saja bukan tokoh lokal yang dipilih. Lagi pula, PPU saat ini memiliki kepentingan Nasional," jelasnya.

Ketika nanti ternyata dari Kemend-

agri memutuskan orang pusat ataupun lokal mengisi posisi itu, sambungannya, yang terpenting saat ini ialah adanya kebijakan-kebijakan di PPU selama satu tahun ke depan yang akan bersinergi dengan perkembangan IKN.

"Kami harapkan itu. Sebab, di PPU juga punya kepentingan, karena statusnya sebagai penyangga utama IKN. Kalaupun yang dipilih adalah orang lokal juga diharap kepemimpinannya memiliki kebijaksanaan yang lebih, karena memahami kewilayahan yang lebih kontekstual," ungkap Mujahid.

Terlepas dari itu, DPD Partai Gelora PPU mengingatkan bahwa sekarang masyarakat PPU ingin ikut serta mensukseskan IKN. Artinya peran pemerintah pusat sangat diharapkan punya dampak yang positif lebih luas terkait hal itu.

"Poinnya, lokal ataupun nggak lokal, yang penting PPU maju seiring dengan hadirnya IKN. Jadi nggak perlu terjebak dengan isu lokal dan nasional. Karena sekarang PPU ini juga menasional," tutup Mujahid. (SBK)



TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000\_bontang —

**LET'S TEST DRIVE!**

**EZ Deal**  
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

**AUTO2000 BONTANG**  
Jl. Bigien Kalimantan No. 116A, Sebelang Nac, Bontang Baru, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

**BOOKING THS SAJA**

**BTS**  
*di Digiroom*

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1<sup>st</sup> OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA\*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo **BTSOLI**

\*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :  
**Adi S : 0822-5435-0088**

**AUTO 2000**  
member of ASTRA

Bontang

# MEDIA KALTIMTARA

JUMAT,  
15 SEPTEMBER  
2023

.COM

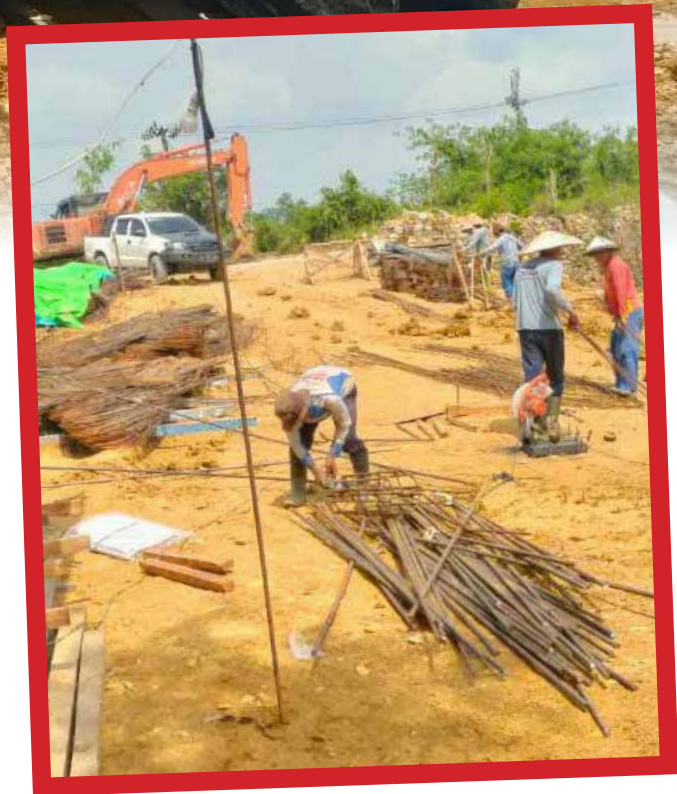
PASANG IKLAN  
HUBUNGI:  
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA



## PENGERJAAN ORPIT JEMBATAN SALIMBATU TELAN ANGGARAN RP 9,5 MILIAR

BACA HALAMAN 2-3



## GUBERNUR INGATKAN ASN AGAR SIAP HADAPI BERBAGAI SITUASI

BACA HALAMAN 12



ISTIMEWA

**DISTRIBUSI MATERIAL:** Pengerjaan Orpit Jembatan Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, aktivitas masyarakat dialihkan.

# Pengerjaan Orpit Jembatan Salimbatu Telan Anggaran Rp 9,5 Miliar

**TANJUNG SELOR** - Jembatan Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan secara resmi ditutup per 18 September hingga 31 Desember. Penutupan itu dilakukan, lantaran adanya perbaikan orpit jembatan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (DPUPR) Bulungan, Khairul saat dikonfirmasi menga-

takan, pengerjaan orpit jembatan ditargetkan rampung pada 31 Desember 2023.

“Iya, itu dilakukan penutupan karena ada pengerjaan orpit Jembatan. Rencana kita mulai penutupan pada Senin depan,” ujar Khairul, saat ditemui oleh wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/9/2023).

Selama penutupan, aktivitas

masyarakat dan kendaraan yang melintas kata dia dipastikan tidak terganggu. Karena pihak kontraktor telah disediakan tambang untuk penyebrangan.

“Itu sudah disiapkan tambangan untuk penyebrangan, tapi ada jam tertentu. Lewat, dari waktu yang ditentukan itu dikenakan tarif,” bebernya.



Waktu penyebrangan tambangan salimbatu, dibuka mulai pukul 06.30 sampai dengan 08.00 wita. Selanjutnya, dibuka kembali pada pukul 12.00 hingga 13.30 wita. Dan kembali beroperasi pada pukul 16.00 sampai dengan 18.00 wita.

“Yang jelas ada subsidi untuk penyebrangan, tapi diluar waktu yang ditentukan dimungkinkan berlaku tarif, diangka kisaran Rp 5 ribu sekali penyebrangan, kalau tidak keliru,” ucapnya.

Perbaikan Jembatan Salimbatu, selain orpit juga termasuk pada lantai jembatan. Adapun, alokasi anggaran pengerjaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Bulungan.

“Anggaran untuk pembangunan itu sekitar Rp 9,5 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bulungan,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani saat dikonfirmasi menuturkan, pemerintah sudah lakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya rencana perbaikan orpit jembatan. Sosialisasi dengan melibatkan perangkat Desa dan Kecamatan setempat.

Sehingga aktivitas kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Karena, ini berkaitan dengan percepatan pengerjaan Jembatan dengan mengoptimalkan sisa waktu yang ada. “Kita menargetkan, akhir tahun ini selesai,” jelasnya.

Dikatakan Syarwani, perbaikan orpit jembatan itu penting, karena kalau tidak segera dilakukan perbaikan dapat mengancam keselamatan masyarakat yang melintas Jalan Salimbatu. “Perbaikan dilakukan pada dua sisi jembatan,” terangnya.

Untuk memudahkan pengerjaan, Syarwani minta kerjasama masyarakat untuk sebaiknya melintas pada jalan poros trans Kalimantan selama pengerjaan berlangsung. Hal itu berkaitan dengan keselamatan dan keamanan dalam bekerja. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur  
Editor: Andhika





HUMAS DPKD KALTIM

Sesi foto bersama acara Bimbingan Bimtek Risk Assesment di Aula PDKD Kaltim.

# Agar Sejarah Tak Hilang, Naskah Kuno Wajib Dirawat Sesuai Standar

**SAMARINDA** - Pemeliharaan naskah kuno tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, harus sesuai standar. Sebab jika tidak, akan merusak arsip tersebut dan sejarah yang tertulis di dalamnya pun ikut hilang.

Deputi Bidang Konservasi Kearsipan, Kandar mengatakan hal tersebut saat menyampaikan materi Bimbingan Teknis (Bimtek) Risk Assesment di Aula Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kalau naskah arsip hilang atau rusak sejarah juga rusak,” jelas Kandar.

Dia menerangkan, penilaian risiko atau Risk Assessment, adalah penilaian suatu risiko dengan cara membandingkannya terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan.

“Oleh sebab itu kita harus tahu cara mendiagnosis arsip akan dirawat dengan metode apa, karena perhatian terhadap naskah kuno harus dipelihara sesuai standar,” paparnya.

Menyetujui pemaparan Kandar, Kepala DPK Kaltim, Muhammad Syafranuddin berterima kasih kepada ANRI, karena menurutnya naskah kuno dan arsip merupakan aset yang perlu terjaga.

“Terima kasih kepada ANRI, sekali lagi naskah kuno dan arsip merupakan aset yang perlu kita jaga bersama keberadaannya,” ucap pria yang akrab disapa Ivan tersebut. (adv/and)



# Ini 4 Kabupaten/Kota yang Menjadi Tujuan Tour Library Kaltim 2023

**SAMARINDA** - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur akan kembali menggelar Tour Library Kaltim. Rencananya, ada empat kabupaten/kota yang akan dituju dalam acara tersebut.

Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPK Kaltim, Nikko Dwi Nanda Armanjaya memaparkan, mengenai empat kabupaten/kota tersebut yakni Samarinda, Bontang, Kutai Timur dan Berau. "Seperti tahun lalu, tahun ini kita akan kembali menyelenggarakan Tour Library Kaltim, dan rencananya akan digelar pada pertengahan November," ungkapnya.

Ada nuansa berbeda pada Tour Library Kaltim tahun ini. Jika pada 2022, tour dilakukan ke kabupaten/kota di arah selatan Kaltim, tahun ini tour akan menuju arah utara Kaltim. "Tahun lalu kita menuju arah selatan, tahun ini kita akan ke arah utara,



ADV DPK KALTIM

**Nikko Dwi Nanda Armanjaya**

dimulai dari Samarinda, kemudian Bontang, berlanjut ke Kutai Timur, dan berakhir di Berau," jelas Nikko, yang juga menjabat sebagai ketua panitia Tour Library Kaltim.

Tujuan dari Tour Library ini adalah untuk mempromosikan keberadaan perpustakaan di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Nikko berharap kegiatan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menjadi wilayah kunjungan Tour Library Kaltim. "Kami berharap mendapat dukungan dari DPKD Kabupaten/Kota yang akan kami kunjungi, serta stakeholder lainnya seperti Dinas Pendidikan, agar kegiatan ini berjalan lancar," katanya.

Diketahui, Tour Library Kaltim merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh DPKD Kaltim setiap tahun, bekerja sama dengan Gerakan Masyarakat Minat Baca (GPMB) Kaltim dan anggota DPRD Kaltim.

Dalam kegiatan Tour Library Kaltim, akan ada berbagai aktivitas seperti membaca buku bersama, mendongeng, belajar menulis, diskusi literasi bagi remaja bersama penulis muda, serta workshop dengan narasumber penulis novel dan duta baca Indonesia, Gol A Gong. (adv/and)

# DPK Kaltim dan Kaltara Teken Kerjasama, Perkuat Pengembangan Centre of Excellent

**SAMARINDA** - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim dan DPK Kaltara melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama guna memperkuat komitmen pengembangan Centre of Excellent layanan perpustakaan serta informasi budaya lokal Kalimantan.

Diketahui, perjanjian kerjasama itu berlangsung di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Kamis (7/9/2023) lalu, yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas DPK Kaltara, Yosua Batara Payangan dan Kepala Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama DPK Kaltim, Mustika Wati.

"Perjanjian sebagai bentuk tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya, pada Juli kemarin, pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Centre of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno di Aula DPK Kutai Kartanegara," ungkap Mustika.

Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan bukti komitmen DPK Kaltim untuk melakukan kerja sama secara tertulis dengan DPK Kalimantan Utara.

"Ini tindak lanjut dari pertemuan waktu itu di Kukar, kita buat perjanjian dengan seluruh DPKD Se-Kalimantan," ujarnya.

Diketahui pada Juli lalu, seluruh DPK se-Kalimantan melakukan Pertemuan di Kukar, pada kegiatan Koordinasi Pengembangan Centre of Excellent Budaya Kalimantan dan Sosialisasi Pelestarian Naskah Kuno di Aula DPKD

Kutai Kartanegara. Dengan menghasilkan penandatanganan kerjasama antara lima provinsi di Pulau Borneo dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan warisan budaya melalui naskah kuno di Kalimantan. (adv/and)



ADV DPK KALTIM

**Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh DPK Kaltim dan DPK Kaltara di Tanjung Selor, Bulungan beberapa waktu lalu.**



## Penyebab Kematian Nabila belum Terungkap, Polisi Tunggu Hasil Labfor

**TARAKAN** - Penyebab kematian Nabila (21), perempuan yang ditemukan meninggal dunia di Jalan Lumpuran Kampung Satu pada Sabtu (26/8/2023) lalu, belum juga terungkap. Polres Tarakan masih menunggu hasil pemeriksaan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim.

“Proses pemeriksaan membutuhkan waktu dua minggu. Ini baru minggu pertama. Inshaallah minggu depan ada hasilnya,” ucap Kasatreskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakthika Putra kepada awak media, Rabu (13/9/2023).

Lanjutnya, untuk mengungkap kasus ini, Polres Tarakan menggunakan Scientific investigation dan IT. “Jadi harus kita padukan (science dan IT,

Red.) untuk mencari alat bukti petunjuk yang lain,” jelasnya.

Dilanjutkannya, dari hasil autopsi diketahui organ tubuh korban masih dalam keadaan bersih dan tidak ditemukan racun ataupun alkohol. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 17 saksi.

“Jadi saksi bertambah dua orang, sebelumnya 15 orang. Dua tambahan itu dari teman-teman korban,” sebutnya.

Saat disinggung apakah kepolisian sudah mengantongi nama pelaku, perwira berpangkat tiga balok ini enggan menjelaskannya lebih jauh. Randhya hanya menyebut, pihaknya fokus mencari petunjuk dan alat bukti untuk menemukan siapa pelakunya.

“Saat ini yang dicurigai pasti ada namun kami harus mencari petunjuk dan alat bukti yang lain. Kami tidak bisa menuduh tanpa ada alat bukti yang lain,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, wanita muda berinisial N (21) ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya yang berada di Jalan Lumpuran RT16 Kelurahan Kampung Satu, Sabtu (26/8/2023). N pertama kali ditemukan teman sekelas kosnya, sekira pukul 08.30 Wita, dalam kondisi wajah yang membiru akibat lilitan kabel stop kontak berwarna putih yang menjerat lehernya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya  
Editor: Andhika



MR saat ikut memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 5,42 gram di halaman Kantor BNNK Tarakan.

ADE/MKR

# Intel Korem Maharajalila dan BNNK Tarakan Gagalkan Sabu Siap Edar

TARAKAN - Intel Korem 092 Maharajalila bersama BNNK Tarakan berhasil menggagalkan peredaran sabu-sabu dari seorang pria berinisial MR (43). Rencananya, barang haram tersebut akan dijual seharga Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BNNK Kota Tarakan, Kombes Pol Deden Andriana mengungkapkan, kasus diawali dengan penangkapan tersangka oleh intel Korem saat sedang menjual barang haram tersebut. Kemudian berkoordinasi dengan BNNK, pada Kamis (17/8/2023) sekira pukul 03.00 Wita.

"Teman-teman dari intel Korem tidak sengajameliht gelagat yang mencurigakan dari MR. Setelah mendekati target, pria tersebut melarikan diri dan cepat membuang satu buah dompet," terangnya, Kamis (14/9/2023).

Anggota Korempuncurigadan melakukan penangkapan di kawasan Jalan Aki Balak. Setelah dilakukan pengeledahan, dari dompet pelaku didapati 32 paket kecil sabu-sabu siap edar. "Kemudian kami menyita barang bukti yang dikemas

dalam plastik bening kecil yang siap dijual seharga Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu," ucap Deden

Selanjutnya pada waktu yang sama, yakni (17/8/2023) sekira pukul 14.00 Wita, tim berantas BNNK Tarakan langsung melakukan pengembangan di sekitar lokasi, tepatnya di gang Mitra RT 20 Karang Anyar Pantai dengan disaksikan Ketua RT setempat.

Alhasil, petugas kembali menemukan sebuah dompet berisi 27 paket

kecil sabu-sabu siap edar di semak sekitar peternakan ayam. Namun tidak ditemukan pemilik dompet dan sabu-sabu tersebut. "Dari pengungkapan kasus ini, total barang bukti yang berhasil diamankan seberat 8,48 gram. Dari total itu, 5,42 gram sabu-sabu dimusnahkan pagi ini di halaman kantor BNNK Tarakan," tandasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia  
Editor: Andhika



# Gelar Rakor Timpora, Perkuat Pengawasan WNA

TARAKAN - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Hotel Tarakan Plaza, pada Kamis (14/09/2023). Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Andi Mario mengatakan, ada beberapa atensi dalam pembahasan rakor ini. Yang pertama mengenai perkembangan terakhir di Kota Tarakan, terdapat beberapa pintu masuk menuju Provinsi Kalimantan Utara yang telah dibuka. Seperti di Pelabuhan Malundung untuk rute internasional ke Tawau, Malaysia.

Dengan dibukanya pintu tersebut, dia mengajak seluruh stakeholders untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. "Baik terhadap orang asing maupun warga negara sendiri yang akan keluar maupun masuk ke Kalimantan Utara. Jadi nanti ada dua pintu masuk yaitu di Nunukan dan Tarakan," ungkap Andi Mario.

Yang kedua, terkait dengan dibukanya Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara. Kendati kawasan itu berada di wilayah Kabupaten Bulungan, namun Kota Tarakan menjadi pintu masuk lalu lintas orang dari pulau lain. Sehingga dalam hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh unsur instansi yang tergabung dalam Timpora.

"Rapat Timpora ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi dan saling bertukar informasi untuk menyelesaikan permasalahan keberadaan orang asing dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan Kota Tarakan yang kita cintai ini," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Tarakan, Effendy Djuprianto yang turut membuka kegiatan ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas berbagai peran serta segenap jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Tarakan yang selama ini telah aktif menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Tarakan sehingga tugas-tugas penyelenggaraan negara dapat berjalan dengan lancar.

"Kebersamaan ini merupakan modal besar bagi kita untuk mewujudkan Tarakan sebagai kota maju dan sejahtera melalui Smart City," ucapnya.

Dikatakannya, Pemerintah Kota Tarakan terus berkomitmen men-



Suasana Rakor Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Hotel Tarakan Plaza, pada Kamis (14/09/2023).

dukung tugas-tugas berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas Timpora.

Effendy mengungkapkan, sebagai pusat aktivitas pergerakan orang, Kota Tarakan sangat rawan karena memiliki aset cukup melimpah. Terlebih, Bumi Paguntaka merupakan pulau yang memiliki pintu cukup banyak untuk keberangkatan dan kedatangan warga negara asing.

"Apalagi tidak lama lagi ada KIPI, ada pabrik-pabrik. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Tarakan. Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi antar instansi terkait dalam rangka menyamakan persepsi dalam pengawasan orang asing sesuai dengan bidang tugas masing-masing – masing mutlak kita harus lakukan," kata Effendy.

Sebagai kota transit, menurutnya

Tarakan perlu dijaga agar tidak ada lalu lintas orang asing dan barang yang disalahgunakan untuk kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab misalnya perdagangan orang, penyelundupan manusia, lalu lintas barang terlarang seperti narkoba dan psikotropika, serta kepentingan bernuansa politik, ekonomi, dan sosial budaya yang mengancam stabilitas negara dan daerah.

"Saya berharap melalui Rapat Tim Pengawasan Orang Asing ini dapat menyamakan persepsi sekaligus menguatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tim yang telah dibentuk, tentunya menginginkan agar keberadaan orang asing di Kota Tarakan senantiasa memberikan manfaat yang positif dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutupnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya  
Editor: Andhika



MARTINUS/MKR

**DIBENTUK:** Pemkab Bulungan dan Polresta Bulungan Kolaborasi canangkan Kampung Bebas narkoba.

# Banyak Laporan Polisi, Perumahan Korpri Dideklarasikan sebagai Kampung Bebas Narkoba

**TANJUNG SELOR** – Perumahan Korpri Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, secara resmi dideklarasikan sebagai Kampung bebas narkoba.

Penunjukan perumahan Korpri, berangkat dari banyaknya laporan polisi (LP) yang berhasil diungkapkan di wilayah ini. Peresmian Kampung bebas narkoba, merupakan inovasi yang digagas oleh Polresta Bulungan, berkolerasi dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Kepada sejumlah wartawan, Bupati Bulungan, Syarwani menjelaskan, upaya pemerintah terhadap banyaknya kasus penyalagunaan Narkotika dengan mengoptimalkan rehabilitasi. Pemkab Bulungan, telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bulungan untuk menangani itu.

“Iya, soal upaya kita salah satunya dengan intenskan upaya rehabilitasi. Dan sampai dengan hari ini, terus berjalan,” ujar Syarwani saat ditemui di lokasi acara, Kamis (14/9/2023).

Dia tidak memungkiri, soal keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi yang ada saat ini. Hal itu, menjadi titik perhatian pemerintah untuk

terus berbenah, sehingga secara asasnya dapat terus memberikan layanan yang maksimal.

Lokasi rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNNP Kaltara, telah ditunjukkan di Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan. Soal pembenahan balai rehabilitasi, sambung Syarwani Pemkab Bulungan telah berkoordinasi dengan pusat.

“Alhamdulillah, untuk pembiayaan pembenahan infrastruktur itu oleh pemerintah pusat. Kita berharap, dengan cara seperti ini masyarakat Bulungan bisa terhindar dari penyalagunaan Narkotika,” tuturnya.

Secara luas, masyarakat di Bulungan diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan termasuk peredaran gelap narkotika (P4GN). “Kita ingin, ada kesadaran kolektif terhadap bahaya penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika,” tuturnya.

Dilanjutkan Bupati, jika masyarakat sadar akan bahaya narkoba maka penindakan terhadap pelaku penyalagunaan narkoba diyakini ikut berkurang.

“Kita harus pastikan, bahwa generasi muda di Bulungan bebas dari ancaman dan penyalagunaan narko-

ba,” harap Syarwani.

Pada kesempatan yang sama, Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha menambahkan, penunjukan Perum Korpri sebagai kampung bebas narkoba bukan tanpa sebab.

Bahwa di wilayah ini, dalam kurun dua tahun terakhir ada banyak Laporan Polisi (LP) yang berhasil diungkapkan di Perumahan Korpri.

“Hadirnya Kampung bebas Narkoba, diharapkan kesadaran masyarakatnya ikut bertumbuh dan sama-sama menjaga lingkungan ini supaya bebas dari praktek penyalagunaan Narkotika,” ujarnya.

Dia memastikan, selain di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, kepolisian akan terus memperketat penjagaan di kelurahan, kecamatan dan desa di Bulungan. Ini bertujuan, supaya peredaran narkoba dapat diminimalisir. Bahwa memang, ditemukan transaksi narkotika karena adanya keterlibatan penjual dan pemakai.

“Dalam kasus Narkotika, baik pengedar maupun pengunda kita tindak, dengan proses hukum yang ada,” pungkasnya. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur  
Editor: Andhika

# Diduga Terjadi Pencemaran Lingkungan, Dewan Keluarkan Rekomendasi

**TANJUNG SELOR** - Dugaan pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan kerugian pada lahan dan tanaman tumbuh masyarakat di Kecamatan Bunyu, Bulungan mendapat sorotan wakil rakyat.

Belum lama ini, Ketua dan anggota DPRD Bulungan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus), dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Hasilnya, ditemukan adanya kelalaian perusahaan yang membuat lahan dan tanaman masyarakat rusak.

Ketua DPRD Bulungan, Kilat saat dikonfirmasi mengatakan DPRD Bulungan yang tergabung dalam tim pansus telah turun langsung ke lapangan, untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan ke dewan.

“Begitu kita ke lapangan, ternyata benar ada tanaman warga yang mati, seperti kayu gaharu milik warga yang mati. Diduga karena adanya pencemaran oleh perusahaan PT Lamindo,” kata Ketua DPRD Bulungan, Kilat saat disua oleh awak media, Kamis (14/9/2023).

Usai kunjungan dari Bunyu, Kata Kilat DPRD belum bisa menyimpulkan solusi terhadap masalah ini. Tetapi, dari tim pansus tetap akan membuat rekomendasi kepada perusahaan yang dianggap lalai dalam menjaga lingkungan.

“Untuk rekomendasi, saat ini masih di godok oleh tim pansus,” ujarnya.

Dipastikan, perusahaan yang lalai akan diberikan rekomendasi oleh DPRD Bulungan, hal itu lantaran telah dilakukan upaya mediasi yang mempertemukan antara pihak perusahaan dan masyarakat yang menjadi korban. Tetapi, tidak mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak.

Perusahaan dalam hal ini, masih enggan untuk ganti rugi, atas kelalaian yang telah terjadi. “Termasuk jumlah poin rekomendasi itu masih kita godok. Nanti, teknisnya hasil rapat akan diteruskan ke OPD terkait,” bebernya.

Rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Bulungan kepada perusahaan, kata dia nantinya akan diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (KLHK). Namun, untuk rincian lahan yang terdampak akibat dugaan pencemaran, politisi Gerindra ini tidak mengetahui secara rinci.

“Yang jelas, ada beberapa lahan masyarakat ikut terdampak. Kalau dirincikan secara kelompok lebih dari satu kelompok keluarga, termasuk sertifikat milik warga kita lampirkan,” tuturnya.

Mengenai pembahasan bersama tim pansus DPRD Bulungan, kata Kilat tidak menaruh waktu tenggat penyelesaian. “Kita tidak lagi membahas target penyelesaian, tapi cukup mediasi supaya ada penyelesaian kedua belah pihak,” imbuhnya.

Namun, dipastikan rekomendasi tetap dikeluarkan lantaran tidak adanya kata sepakat saat mediasi.

“Bahkan, setelah kita kunjungan dari lokasi, kita masih mempertemukan kembali antara masyarakat dan pihak perusahaan, supaya ada solusi

atas masalah itu, tapi tidak menemukan kata sepakat, karena permintaan masyarakat tidak disetujui oleh perusahaan,” tambahnya.

DPRD, kata dia telah memberikan tenggang waktu kepada perusahaan untuk melakukan itikad baik berupa komunikasi kepada masyarakat yang dirugikan, supaya DPRD Bulungan tidak mengeluarkan rekomendasi.

“Tapi, faktanya tidak menemukan jalan baik atau solusi yang disepakati. Sehingga, kita putuskan tetap memberikan rekomendasi,” tegasnya.

Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, kasus serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Sehingga hal ini menjadi dasar DPRD Bulungan untuk mengeluarkan rekomendasi kepada perusahaan PT Lamindo. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur  
Editor: Andhika



Ketua DPRD Bulungan, Kilat



**AUDIENSI :** Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima kunjungan rombongan Tim Teknis Mahkamah Agung (MA RI, Rabu (13/9).

## Pembangunan Gedung PTA dan PT di KBM Tanjung Selor Akan Dimulai Tahun 2024

**TANJUNG SELOR** - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, menerima kedatangan Tim Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pertemuan itu berlangsung di Kuliner Tepian Kayan (KulteKa) di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (13/9/2023) malam.

Pertemuan ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang akan dibangun di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Adapun rombongan dipimpin oleh Bapak H. Sahwan, SH., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI. Hadir sejumlah anggota tim terampil lainnya seperti Rosfiana, SH., M.H

(Kepala Biro Perlengkapan), Fany Widia, SE., MM (Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Arif Hidayat, SE., M.H (Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Indah Wahyuni, SE, M.M (Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Program Biro Perencanaan dan Organisasi), Rustimah, A.Md., SH., M.M (Kasubbag Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi), serta Desy Putriani Purwastuti, SE, (Staff PPNPN Biro Perlengkapan).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Teknis MARI dengan tekad kuat menyatakan komitmennya untuk segera memulai pembangunan gedung PTA dan PT di KBM Tanjung Selor.

"Kami sudah melakukan survei lokasi, dan rencananya, pembangunan akan dimulai pada tahun 2024," kata Ketua Tim MA RI, H. Sahwan.

Sementara Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik upaya MA RI untuk segera membangun gedung PTA dan PT di wilayah Provinsi Kaltara.

"Pemprov sangat mendukung pembangunan ini, dan kami berharap pembangunan tersebut dapat segera terealisasi," ujar Gubernur Kaltara.

Seperti yang diketahui, pembangunan gedung PTA dan PT memegang peran penting dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kaltara. Gedung ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan hukum yang modern dan efisien di wilayah Kaltara, sekaligus menjadi simbol penegakan hukum yang kuat di daerah.

"Semoga proyek ini sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," ujar Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. (dkisp)

## Wagub Kaltara Tinjau Pembangunan Rumah Jabatan Gubernur

**TANJUNG SELOR** - Usai meninjau pembangunan gedung asrama Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP., M.Si., juga melakukan pengecekan terhadap perkembangan proyek pembangunan Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kaltara, Selasa (12/9).

Rumah jabatan ini merupakan fasilitas penting yang akan mendukung tugas-tugas Gubernur Kaltara dalam memimpin daerah. "Saat ini, proyek pembangunan rumah jabatan ini masih dalam tahap pengerjaan dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2023," kata Wagub Kaltara Yansen TP.

Wagub Yansen TP berharap rumah jabatan ini dapat menjadi tempat yang nyaman dan kondusif bagi Gubernur Kaltara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia juga mengungkapkan apresiasinya terhadap kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam pembangunan rumah jabatan ini.

"Rumah jabatan Gubernur Kaltara dirancang sebagai pusat penting yang akan memungkinkan Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan optimal," ungkap Yansen TP, Wagub Kaltara. (dkisp)



**MONITORING** : Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si melakukan monitoring terhadap pembangunan Rumjab Gubernur, Selasa (12/9) lalu.

## Gubernur Ingatkan ASN agar Siap Hadapi Berbagai Situasi



**PEMBINAAN**: Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum membuka Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian di Lantai 1 Gedung Gadis, Kamis (14/9).

**TANJUNG SELOR** – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar selalu siap menghadapi berbagai situasi. Salah satunya dengan penyetaraan jabatan struktural yang menjadi jabatan fungsional.

Menurutnya, esensi dari penyetaraan dalam jabatan fungsional ini adalah agar terciptanya iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.

"Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memberi pemahaman bagi pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat fungsional dari dinamika regulasi yang mengatur," kata Gubernur pada Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemprov Kaltara, Kamis (14/9).

Gubernur mengungkapkan proses penyederhanaan birokrasi terus dilakukan di Kaltara. Hal ini merupakan wujud mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memangkas panjang alur birokrasi sehingga dapat bergerak secara inovatif adaptif dan responsif.

Turut hadir Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, dan Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, A. Darmuji, S.Sos., M.Si secara daring (Zoom Meeting) serta seluruh forkopimda.

"Adanya regulasi ini harus kita sosialisasikan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi kepegawaian di lingkup provinsi dan kabupaten/kota," tuntasnya. (dkisp)